



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG							
A.	Zona Lindung (Zona L)							
1.	Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
1.1.	Pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan hutan lindung	1. Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kecamatan Tayamdo Tam, Kecamatan Dullah Utara, dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual di Gugus Kepulauan Kei 2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian LH dan Kehutanan (Kemen LH dan Kehutanan) Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		3. Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 4. Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara, dan Kecamatan Yaru di Kabupaten						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Mdonu Hyera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Damer dan Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.2.	Pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi kawasan hutan lindung di PPKT	<ol style="list-style-type: none">1. Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Karang dan Pulau Enu di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;2. Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Tanimbar;</p> <p>3. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdonahyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan</p> <p>4. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Wetar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
1.3.	Pengendalian, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi kawasan resapan air	1. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei</p> <p>3. Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>4. Kecamatan Babar Timur dan Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		5. Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
1.4.	Pengendalian, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi kawasan resapan air di PPKT	1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar						
2.	Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat							
2.1.	Pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung pada sempadan pantai	1. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, serta Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Kecamatan Kei Besar Selatan termasuk	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Tanjung Weduar yang menjadi titik garis pangkal kepulauan Indonesia, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Kei Kecil Timur pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		4. Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin termasuk Karang Sarikilmasa yang menjadi titik garis pangkal kepulauan Indonesia, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		5. Tanimbar Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.2.	Pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung pada sempadan pantai di PPKT	1. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara dan Pulau Karaweira di Kecamatan Aru tengah Timur, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur dan Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdonahyera Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar</p> <p>4. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
2.3.	Pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung pada sempadan sungai	1. sungai pada DAS Ohoililir, DAS Hoilder Tawun, DAS Ngilngof, DAS Ohaijang Watdek, DAS Letman, DAS Namar, DAS Kolser, DAS Langgur, DAS Wae Langgur, DAS Debut, DAS Ramadian, DAS Wae Sithean, DAS Dian, DAS Letvuan, DAS Ibra,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		DAS Evu, DAS Ohoinol, DAS Ngabub, DAS Rumat, DAS Wain Lama, DAS Wae Mastur, DAS Elaar Let, DAS Wae Elaar, DAS Wae Ngursoin, DAS Wae Danar, DAS Ohoira, DAS Ohoidertutu, DAS Madwear, DAS Somlain, DAS Ohoiren, DAS Warwut, DAS Letfual, DAS Lebetawi, DAS Dullah, DAS Fiditan, DAS Masrum, DAS Tual, DAS Ohoitel, DAS Lodar El, DAS Taar, DAS Wairat, DAS Ohoimel, DAS Haar Ohoitel, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Langgiar Haar, DAS Ur, DAS Renfan, DAS Depur, DAS Bandaely, DAS Ohoifau, DAS Waer Ohoenam, DAS Hoko, DAS Kilwair, DAS Reyamru, DAS Niela, DAS Tayamdo, DAS Fako, DAS Ohoilim, DAS Elat, DAS Tahait, DAS Waur, DAS Ohoiwait, DAS Ngefuit, DAS Nerong, DAS Larat, DAS Tutrean, DAS Sather, DAS Kilwait, DAS Ngafan, DAS Fer, DAS Weduar, DAS Nuhuyanat, DAS Tamngil Nuhutoin, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Holat, DAS Udar, DAS Lerohoilim, DAS Wakatran, DAS Elralang, DAS Wer, DAS Fa'a, DAS Hangur, DAS Ulat, DAS Fanwar, DAS Mun, DAS Mun Ohoidatun, DAS Adwe Arau, DAS Jerwatu, DAS Naigo, DAS Gumsei, DAS Tasinwaha, DAS Marjina, DAS Marlasi, DAS Merkalamar, DAS Mesidang, DAS Selmona, DAS Gumzai, DAS Langhalau, DAS Fila, DAS Moha, DAS Berdahan, DAS Kompane, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Falwakkawa, DAS Tunguwatu, DAS Sewer, DAS Karaway, DAS Dosi, DAS Salibata, DAS Lau- lau, DAS Nafar, DAS Selibata, DAS Kobraur, DAS Selimar, DAS Gorar, DAS Tunggu, DAS Jabulonga, DAS Laealaut, DAS Dobo, DAS Samang, DAS Wakajabi, DAS Goda- goda, dan DAS Waifual pada WS Kepulauan Kei- Aru. 2. sungai pada DAS Kolaha, DAS Foket, DAS Kelawati, DAS Findai, DAS Maririmar, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Jirlay, DAS Wakua, DAS Kojiran, DAS Dosinamalu, DAS Belatan, DAS Kojjabi, DAS Warloi, DAS Warjukur, DAS Kobroor, DAS Basada, DAS Kaibar, DAS Ponom, DAS Warbola, DAS Murai Baru, DAS Bedidi, DAS Alkadang, DAS Jiriai, DAS Gulili, DAS Papakula, DAS Namara, DAS Benjina, DAS Selilau, DAS Papalouta, DAS Manumbai, DAS Maekoor, DAS Majjuring, DAS Fatujuring, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Perurah, DAS Wangal, DAS Gerdakau, DAS Lorang, DAS Manjau, DAS Murai lama, DAS Wae kabelfara, DAS Laininir, DAS Erorsin, DAS Kongapatalabata, DAS Gumar Sungai, DAS Gomar Meti, DAS Jorang, DAS Krei Lama, DAS Siya, DAS Meme, DAS Kommon, DAS Selarem, DAS Batu Goyang, DAS Wajin, DAS Dosimar, DAS Ngaibor, DAS Ngaibor Lama, DAS Popjatur, DAS Aru, DAS Jerol, DAS Gradagal, DAS Lor-						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		lor, DAS Juring, DAS Alarjir, DAS Lutur, DAS Godalmoma, DAS Rebi, DAS Hokmar, DAS Taberfane, DAS Longgar, DAS Aparas, DAS Bemun, DAS Gomogomo, DAS Masiang, DAS Fatibata, DAS Kobadangar, DAS Maikor, DAS Rabal, DAS Korbor, DAS Wokam, DAS Watulai, DAS Kumui, DAS Benjuring, DAS Tragan, DAS Kola, DAS Warilau, DAS Beleting, DAS Ujir, DAS Wasir, DAS Durjela, DAS Nuhuruwa, DAS						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Tayandu pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar.						
2.4.	Pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung pada kawasan sekitar danau	Danau Ngadi dan Danau Fanil di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.	Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya							
3.1.	Pengembangan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya	Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.2.	Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Pulau Baun	Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.3.	Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Pulau Kobror	Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.4.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Daab	Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.5.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Pulau Larat	Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.6.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Tafermaar	Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.7.	Pengembangan Pengelolaan Cagar Alam Pulau Nuswotar	Kecamatan Wuarlabobar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.8.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Pulau Nustaram	Kecamatan Nirusmas, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.9.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Pulau Angwarmase	Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.10.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Bekau Huhun	Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.11.	Pengembangan pengelolaan Cagar Alam Gunung Api Kisar	Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
3.12.	Rehabilitasi dan pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada kawasan pantai berhutan bakau	1. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 2. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
3.13.	Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau di PPKT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 2. Pulau Leti di Kecamatan Letti dan Pulau Wetar di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	LEMBAGA PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
3.14.	Pengembangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tenggara	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				
4.	Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam							
4.1.	Revitalisasi dan pengendalian kawasan budi daya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor	1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
4.2.	Revitalisasi dan pengendalian kawasan budi daya terbangun pada kawasan rawan gelombang pasang	<ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 4. Kecamatan Tanimbar Utara termasuk Pulau Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Mdonu Hyera dan Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
4.3.	Pemertahanan PPKT dari dampak bencana pada kawasan rawan gelombang pasang	1. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara dan Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru</p> <p>2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan 4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdonu Hyera dan Pulau Leti di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
4.4.	Revitalisasi dan pengendalian kawasan budi daya terbangun dan pengembangan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana banjir	1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
5.	Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi							
5.1.	Revitalisasi, pengendalian kawasan budi daya terbangun, dan pengembangan lokasi dan jalur evakuasi bencana gempa bumi	1. wilayah pesisir Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan termasuk Pulau Panambulai, Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Karang, Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Enu, dan Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 4. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdonahyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.2.	Revitalisasi, pengendalian kawasan budi daya terbangun, dan pengembangan lokasi dan jalur evakuasi bencana gempa Bumi pada PPKT berpenghuni	<ol style="list-style-type: none">1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 3. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.3.	Revitalisasi, pengendalian kawasan budi daya terbangun, dan pengembangan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta	1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen ESDM,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
	pembangunan sarana pemantauan bencana tsunami	Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur di Kota Tual pada Gugus		Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		4. Kepulauan kei Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Babar Timur, dan Kecamatan Mdonu Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.4.	Pemertahanan PPKT dari dampak bencana pada kawasan rawan tsunami	1. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Selatan, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>2. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur dan Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdonahyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar</p> <p>3. Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Wetar</p>		Kemen KP, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.5.	Revitalisasi dan pengendalian kawasan budi daya terbangun pada kawasan rawan abrasi	1. wilayah pesisir Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, serta Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		2. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 4. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdonahyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 5. Kecamatan Moalako, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.6.	Pemertahanan PPKT dari dampak bencana pada kawasan rawan abrasi	1. Pulau Ararkula di Kecamatan Aru Utara dan Pulau Karaweira di Kecamatan Aru Tengah Timur, Pulau Panambulai dan Pulau Kultubai Utara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, serta Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen KP, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara, Pulau Asutubun di Kecamatan Tanimbar Selatan, serta Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdonu Hyera, Pulau Leti di						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Gugus Kepulauan Terselatan						
5.7.	Revitalisasi fungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuan air tanah	<ol style="list-style-type: none"> CAT Kai Kecil, CAT Kai Dullah, dan CAT Kai Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei CAT Kola, CAT Komfane, CAT Wokam, CAT Kobror, CAT Penambulan, CAT Baun, 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>CAT Workai, CAT Koba, CAT Trangan, dan CAT Maikoor di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru</p> <p>3. CAT Watidal, CAT Larat, CAT Saumlaki, CAT Selaru, CAT Seira, CAT Wuru, dan CAT Wuliaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>4. CAT Marsela, CAT Tutuwawang, CAT Tela, CAT Emraing, dan CAT Wetan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Babar 5. CAT Lakor dan CAT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
6.	Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya							
6.1.	Pengembangan pengelolaan dan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada terumbu karang	1. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		2. Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 4. Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		5. Tanimbar Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Mdonahyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Letti, Kecamatan Moalako, dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
6.2.	Pengembangan pengelolaan dan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kehidupan biota laut pada kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi	<ol style="list-style-type: none"> kawasan koridor lumba-lumba di Laut Banda dan Laut Arafura kawasan koridor penyu hijau di Laut Aru 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				
B.	Zona Budi Daya (Zona B)							
1.	Zona Budi Daya 1 (Zona B1)							
1.1.	Pengembangan dan/atau pengendalian fungsi kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenbud-dikdasmen, Kemen Ristek dan Dikti, Kemenkes, Kemenperin, Kemenpar, Kemenhan,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 4. Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau		BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
1.2.	Pengendalian dampak negatif kawasan industri yang mengganggu fungsi lingkungan di pusat permukiman perbatasan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 2. Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 4. Kecamatan Tanimbar 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenperin, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenhan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
2.	Zona Budi Daya 2 (Zona B2)							
2.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan permukiman perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 2. Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU dan Pera, Kemenbuddik-dasmen, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa, PDT dan Trans), Kemenkes, Kemenhan, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		4. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Yaru, dan Kecamatan Kormomolin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Mdon Hyera dan Kecamatan Pulau-Pulau Babar di						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Damer pada Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
2.2.	Pengembangan fasilitas depo pangan lokal untuk mengatasi kerawanan pangan dan fasilitas depo bahan bakar minyak di Pulau-pulau Kecil Terluar	1. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 2. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
	berpohuni	Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 3. Pulau Marsela, Pulau Meitimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan						
3.	Zona Budi Daya 3 (Zona B3)							
3.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	1. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan dan Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU dan Pera, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		2. Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		4. Aru pada Gugus Kepulauan Aru Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Kormomolin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Mdonahyera, Kecamatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.						
3.2.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perikanan budi daya	Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah Selatan, dan Kecamatan Aru Utara di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru						
4.	Zona Budi Daya 4 (Zona B4)							
4.1.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perkebunan antara lain kelapa dan jambu mete dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei</p> <p>3. Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru</p> <p>4. Kecamatan Selaru,</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Wetar,						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Letti, Kecamatan Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5	Zona Budi Daya 5 (Zona B5)							
5.1.	Pengembangan, kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari	<ol style="list-style-type: none"> Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru 	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Utara di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru 3. Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		<p>pada Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>4. Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar</p> <p>5. Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan</p>						
5.2.	Pengendalian alih fungsi kawasan hutan produksi konversi yang berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi menjadi kawasan budi daya lainnya	1. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei 2. Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 3. Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		4. Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 5. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar 6. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						
5.3.	Pengembangan komoditas hutan non kayu pada hutan produksi terbatas	1. Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei 2. Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH dan Kehutanan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		3. Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 4. Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
6.	Zona Perairan 1 (Zona A1)							
6.1.	Pengembangan Zona A1 yang berfungsi melindungi titik garis pangkal dari abrasi, mempertahankan wilayah kedaulatan negara, memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari, dan melindungi ekosistem	1. Laut Aru dan Laut Arafura yang berhadapan dengan Kecamatan Aru Utara termasuk Pulau Ararkula dan Pulau Karaweira, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan termasuk Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, dan Pulau Kultubai Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur termasuk Pulau Karang, Pulau Enu, dan Pulau Batugoyang, serta Kecamatan Aru Selatan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen ESDM, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenhub, Kemenhan, Pemda, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>di Kabupaten Kepulauan Aru</p> <p>2. Laut Aru dan Laut Banda yang berhadapan dengan Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara</p> <p>3. Laut Arafuru dan Laut Banda yang berhadapan dengan Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara termasuk Pulau Larat, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar</p>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Selatan termasuk Pulau Asutubun, dan Kecamatan Selaru termasuk Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat 4. Laut Banda yang berhadapan dengan Kecamatan Babar Timur termasuk Pulau Marsela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdonu Hyera termasuk Pulau Meatiarang, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti termasuk Pulau Leti,						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034
		Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan termasuk Pulau Kisar, dan Kecamatan Wetar termasuk Pulau Wetar dan Pulau Liran Kabupaten Maluku Barat Daya						
7.	Zona Perairan 2 (Zona A2)							
7.1.	Pengembangan Zona A2 yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari	pada perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di: a. Laut Aru dan Laut Arafura yang berhadapan dengan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen ESDM, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenhub, Kemenhan, Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		<p>Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru</p> <p>b. Laut Aru yang berhadapan dengan Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara</p> <p>c. Laut Arafura yang berhadapan dengan Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p> <p>d. Laut Timor yang berhadapan dengan</p>		Geospasial, dan/atau Swasta				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					2015- 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034
		Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kecamatan Moa Lakor, dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati